

**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENCEGAHAN JUDI  
ONLINE: STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh:**

**Benyamin Mattheuw Pardede**

**NIM: 2005020016**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pencegahan judi online di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan pendekatan Collaborative Governance. Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dalam sistem kolaborasi yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima institusi terkait di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dalam pencegahan judi online masih belum optimal karena ketiadaan regulasi lokal yang jelas, lemahnya koordinasi, minimnya pelibatan aktor non-pemerintah, dan keterbatasan sumber daya. Dalam kerangka Collaborative Governance Regime, dinamika kolaborasi belum terwujud secara efektif karena belum adanya keterlibatan berprinsip, motivasi kolektif, dan kapasitas aksi bersama yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi formal, penyusunan kebijakan daerah tentang pencegahan judi online, serta peningkatan literasi digital dan peran aktif masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Pencegahan , Judi Online, Tata kelola kolaboratif*

***COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE PREVENTION OF ONLINE  
GAMBLING: A STUDY IN TANJUNGPINANG CITY***

***By:***

**Benyamin Mattheuw Pardede**

**NIM: 2005020016**

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze collaborative governance in the prevention of online gambling in Tanjungpinang City using the Collaborative Governance approach. Online gambling is a form of cybercrime that continues to increase and causes significant social, economic, and legal impacts. Prevention efforts carried out by various actors, such as local government, police, prosecutors, the Communication and Information Office, and the Social Service Office, are still sectoral and have not been coordinated within an integrated collaborative system. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving five related institutions in Tanjungpinang City. The results show that collaboration among institutions in preventing online gambling is still suboptimal due to the absence of clear local regulations, weak coordination, minimal involvement of non-government actors, and limited resources. Within the Collaborative Governance Regime framework (Emerson et al.), the dynamics of collaboration have not been effectively realized because there is no principled engagement, collective motivation, or strong joint action capacity. This study recommends the establishment of a formal collaboration forum, the formulation of regional policies on online gambling prevention, as well as increasing digital literacy and the active role of civil society to create sustainable collaborative governance.*

***Keywords: Prevention, Online Gambling, Collaborative Governance***